

bermanfaat untuk memperluas kajian film Indonesia yang berfokus pada isu sosial kontemporer, khususnya fenomena pengucilan publik dan dinamika kekuasaan dalam ruang sosial dan digital. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi dan kajian budaya, dengan menawarkan perspektif interdisipliner antara studi media, teori sosial, dan analisis sinematik. Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai wadah untuk memperdalam pemahaman tentang cara sinema Indonesia mengartikulasikan isu moral dan sosial secara visual dan naratif. Bagi pembaca dan masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi kritis terhadap praktik *cancel culture* yang kian marak di era media sosial. Sementara bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa film dan komunikasi untuk mengaitkan teori budaya dengan praktik produksi dan analisis film

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian telah mengkaji fenomena *cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial baru dalam masyarakat digital. Menurut Pertiwi (2022), *cancel culture* di Indonesia sering muncul sebagai reaksi spontan terhadap pelanggaran norma sosial yang terekspos di media sosial, namun kerap berujung pada penghakiman publik yang berlebihan tanpa proses refleksi mendalam. Penelitian oleh Rahmawati dan Santoso (2021) menyoroti bahwa *cancel culture* mencerminkan dinamika kekuasaan antara warganet dan figur publik, di mana opini kolektif di platform digital membentuk narasi moral yang menentukan siapa yang diterima atau dikucilkan.

Dalam konteks film Indonesia, Kurnia (2020) mencatat bahwa film-film pasca-reformasi seperti *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* dan *Penyalin Cahaya* menggambarkan pergeseran paradigma dalam representasi kekuasaan, moralitas, dan resistensi terhadap sistem patriarkal. Sementara itu, Wijaya (2021) menemukan bahwa *Penyalin Cahaya* tidak hanya membicarakan kekerasan seksual, tetapi juga menampilkan bagaimana masyarakat menanggapi isu tersebut dengan

pola serupa cancel culture, yaitu mengucilkan individu tanpa mempertanyakan struktur sosial yang menindas.

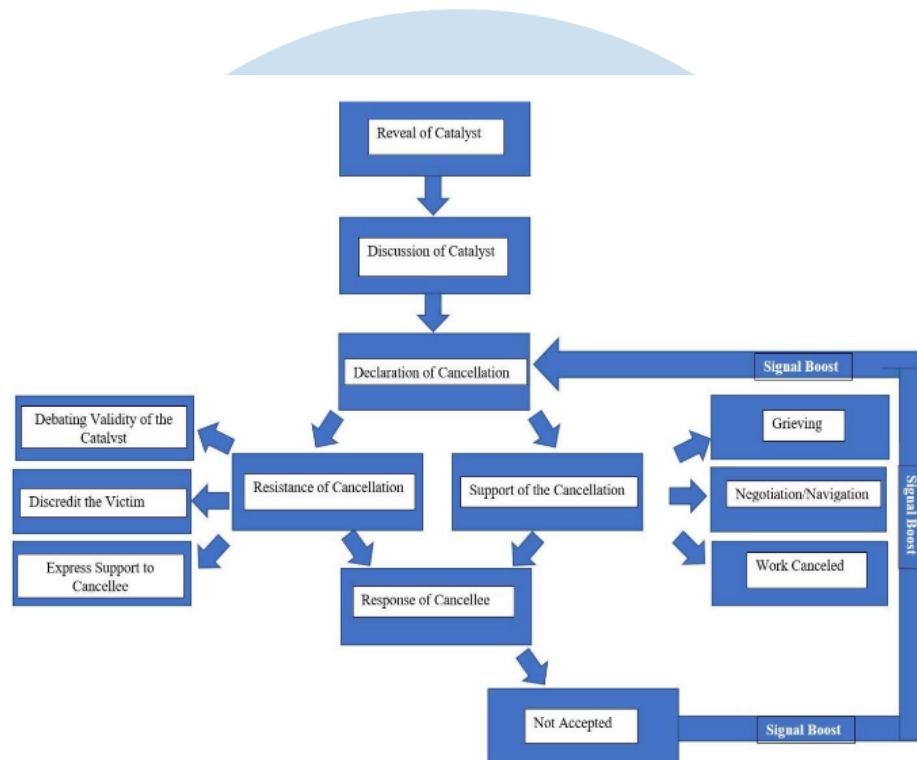
Penelitian lain oleh Chandra (2022) menegaskan bahwa film berfungsi sebagai medium reflektif yang mampu memvisualisasikan praktik pengucilan sosial dan konflik moral secara simbolik. Namun, penelitian terdahulu belum secara eksplisit menghubungkan representasi cancel culture dengan bentuk bahasa visual film itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan teori cancel culture dari Haskell (2021) dan analisis *mise en scène* untuk membaca bagaimana proses pengucilan sosial digambarkan secara sinematik dalam *Penyalin Cahaya*.

Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap hubungan antara struktur sosial dan konstruksi visual. Elemen-elemen seperti pencahayaan, warna, blocking, dan komposisi ruang digunakan untuk menafsirkan tahap-tahap cancel culture yang muncul dalam narasi film. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana bahasa visual dalam *Penyalin Cahaya* tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga sebagai cara untuk merepresentasikan dinamika pengucilan, kekuasaan, dan pencarian kebenaran di era digital.

2.1. LANDASAN TEORI

2.2.1 *Teori Representasi Cancel Culture*

Teori Haskell (2021) menjelaskan bahwa praktik *cancel culture* berjalan melalui enam tahapan sosial yang saling berkaitan, dimulai dari pembentukan opini publik hingga pengucilan individu yang terkena *cancel*.



Gambar 2.1 Rangkaian Peristiwa *Cancel Culture*
(Sumber: Haskell 2021)

Menurut Haskell (2021), proses *cancel culture* tidak berjalan secara linear sederhana, tetapi berkembang melalui enam tipe respons publik yang dapat muncul secara berurutan maupun tumpang-tindih tergantung dinamika isu yang beredar.

1. *Discredit the Victim*

Tahap paling awal yang umumnya muncul ketika praktik *cancel culture* terjadi. Publik berfokus untuk memperlakukan, menyalahkan, dan merendahkan individu yang terkena *cancel*. Strategi ini dilakukan untuk menghancurkan kredibilitas korban dan mengalihkan perhatian dari tindakan pelaku. Bentuk umumnya berupa *shaming*, *bullying*, serangan karakter, dan penilaian moral.

2. *Express Support to the Cancelee*

Setelah gelombang kemarahan menurun, muncul pola kompensasi emosional kolektif. Publik mulai memberi dukungan kepada korban *cancel culture* dengan

menyoroti kontribusi positifnya di masa lalu atau mempertanyakan apakah ia layak menerima hukuman sosial sebesar itu.

3. Debate Validity of Catalyst

Tahap di mana masyarakat mulai mempertanyakan kebenaran, relevansi, atau proporsionalitas bukti awal yang memicu pembatalan. Tujuannya adalah meminimalkan, merasionalisasi, atau menormalisasi tindakan bermasalah untuk menurunkan tingkat kecaman publik.

4. Grieving

Respons emosional publik yang merasa kehilangan atas jatuhnya figur atau karya yang sebelumnya mereka kagumi. Kekecewaan ini lebih terarah kepada hilangnya konten, reputasi, atau nostalgia daripada kepada korban sebenarnya.

5. Negotiation / Navigation

Fase diskursif di mana publik menegosiasikan ulang posisi mereka terhadap korban *cancel culture*. Terjadi perdebatan mengenai moralitas kasus, relevansi hukuman sosial, sekaligus penyebaran narasi yang bersaing. Ini adalah ruang tarik-uluran antara “layak dihukum” dan “layak diberi kesempatan”.

6. Work Cancelled

Tahap paling ekstrem. Dampak pembatalan menjadi material. Korban kehilangan posisi sosial, kesempatan kerja, dan dukungan institusional. Reputasi yang rusak bertransformasi menjadi isolasi sosial dan ekonomi jangka panjang.

2.2.2 Pendekatan Mise en Scène

Menurut Bordwell dan Thompson (2010), *mise en scène* merupakan salah satu komponen utama dalam analisis film yang mencakup seluruh elemen visual di dalam bingkai gambar dan cara elemen tersebut diatur. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti “penataan di atas panggung”, dan dalam sinema,